

Gerakan Mahasiswa Indonesia: Peran Soe Hok Gie Tahun 1960-1969

Wayne Yuniarta Silaban¹, Aksilas Dasfordate², Aldegonda Evangeline Pelealu³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: waynesilaban05@gmail.com¹, aksilasdasfordate@unima.ac.id², aldegondapelealu@unima.ac.id³

Article History:

Received: 23 November 2025

Revised: 08 Januari 2025

Accepted: 19 Januari 2026

Keywords: Mahasiswa, Politik, Soe Hok Gie, 1960-1969

Abstract: Penelitian ini menganalisis peran Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa Indonesia yang berdampak pada kondisi politik Indonesia tahun 1960-1969 dan relevansinya dengan dunia kampus kontemporer. Menggunakan metode sejarah Marc Bloch pertama, merumuskan masalah penelitian kedua, melakukan kritik sejarah untuk memastikan keaslian sumber ketiga, mengidentifikasi pola data sesuai permasalahan penelitian, keempat, menganalisis sebab-akibat dari masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis, gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1960-1969 terjadi karena krisis ekonomi yang parah dan sikap Soekarno yang dianggap otoriter dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat serta peristiwa G30S yang dimana PKI dituding sebagai dalangnya. Sehingga Soe Hok Gie memainkan peran penting yang berani mengkritik Soekarno dan memperjuangkan perubahan melalui tulisannya. Keberhasilan Soe Hok Gie dan mahasiswa lain dalam membuat gerakan berupa demonstrasi berhasil menyuarakan Tritura, meningkatkan kesadaran politik di masyarakat dan menguatkan peran mahasiswa sebagai agen moral dalam politik nasional.

PENDAHULUAN

Refleksi atas tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa (*nation*), dipahami melalui tonggak-tonggak sejarah yang telah di tanamkan oleh generasi pendahulu yang telah berjuang dan mempertahankan Indonesia merdeka. Sebagai fakta sejarah menunjukkan bahwa salah satu komponen bangsa yang memegang peranan penting dalam setiap perubahan adalah kaum muda atau mahasiswa. Dalam ingatan kolektif, pemuda Indonesia tidak saja telah berhasil menentang hegemoni dan mengusir penjajah tetapi juga berperan penting dalam masa kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan memelopori perubahan (Toto Widyarsono, MSi, 2011).

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dalam gerakan sosial, muncul karena adanya motivasi tertentu. Sama halnya dengan gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1960-1969 atau yang sering disebut Angkatan 66 yang dipicu oleh rasa frustrasi dengan diberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Kehidupan Kampus atau (NKK/BKK) yang melarang mahasiswa

berpolitik dalam kampus, ditambah dengan kondisi ekonomi yang menurun menyebabkan tingginya inflasi dan terjadi pula ketimpangan sosial, ketidakadilan, penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, administrasi negara yang kacau dan kondisi politik yang tidak jelas, sehingga mahasiswa melakukan gerakan dengan tujuan menghilangkan rasa frustrasi (Andik Matulesy, 2005).

Gerakan mahasiswa tahun 1966 berhasil menumbangkan Orde Lama dan mendirikan rezim Orde Baru yang bertahan sampai 1998, mereka menunjukkan bahwa para pemimpin Orde Lama yakni para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah tidak lagi mampu memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia (LB. Setiadi, 2020).

Salah satu tokoh pemuda yang berperan penting dalam pergerakan mahasiswa tersebut adalah Soe Hok Gie. Soe Hok Gie merupakan seorang keturunan asli dari Tionghoa, yang kemudian ayah dan ibunya berpindah ke Indonesia (Setiadi, 2020). Laki-laki peranakan Tionghoa ini terkenal “sangat berani” menantang maut, ia sering kali menyebutkan nama-nama oknum tertentu yang dianggapnya “bertanggung jawab” atas persoalan bangsa yang terjadi. Contoh keberanian Soe Hok Gie terungkap dalam kutipan. *“Sebagian dari pemimpin KAMI adalah maling juga. Mereka korupsi, mereka berebut kursi, rebut-ribut pesan mobil dan tukang kecap pula. Tapi sebagian mereka jujur”* (Soe Hok Gie, 1983).

Begitu juga dengan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan presiden Soekarno yang keluar dari jalur revolusi mulai menuai kritik. Pembubaran DPR pilihan tahun 1955, penetapan Manipol USDEK sebagai landasan Demokrasi terpimpin, menetapkan MPRS sebagai lembaga tertinggi menurut konstitusi dan rencana pembrangusan, dan partai-partai yang tidak setuju dengan rencana terpimpin merupakan langkah awal penyelewengan Soekarno (Supriyatna, 2007).

Pada tahun 1965 merupakan masa terberat bagi perekonomian pemerintahan Soekarno. Kesejahteraan rakyat jatuh merosot karena laju inflasi yang mencapai 650%. Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi pada tanggal 13 Desember, dengan demikian memperburuk keadaan rakyat Indonesia (Ahmaddani, 1984). Kondisi ekonomi yang semakin memburuk membuat rakyat terjepit dimasa awal pembentukan negara. Pada masa ini gerakan mahasiswa akan berperan besar dalam rangka perubahan, termasuk di dalamnya Soe Hok Gie yang aktif menyuarakan pendapat melalui aksi massa maupun tulisan-tulisan di media massa (Mochtar Lubis, 1969).

Sebelum turun ke jalan untuk mengintensifkan aksi, mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan isu-isu yang muncul, seperti krisis ekonomi dan politik. Setelah berdiskusi secara intensif, mereka mengadakan seminar dengan mengundang para pakar ekonomi dan politik untuk memperdalam pemahaman dan mengembangkan gerakan. Berbekal kesadaran intelektual ini, mahasiswa membangun solidaritas untuk memperkuat gerakan mereka, yang pada akhirnya berujung pada aksi-aksi kekerasan berskala besar untuk melemahkan rezim penguasa (Andik Matulesy, 2005).

Saat demonstrasi berjalan, Soe Hok Gie tetap berada di garis depan sebagai salah satu suara kritis yang mempertahankan idealisme gerakan mahasiswa. Ia percaya bahwa gerakan mahasiswa harus tetap independen dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak manapun, termasuk militer, yang mulai berkolaborasi dengan mahasiswa pada masa itu. Ketika Soekarno menyadari bahwa kedudukannya sudah goyah, tanggal 20 Februari 1967 ia mengumumkan “Kami Presiden Republik Indonesia/ Mandataris MPRS/ Panglima Tertinggi ABRI, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan Pemerintahan kepada Pengembalian ketetapan MPRS No. IX/MPRS/66 Djenderal TNI Suharto, sesuai dengan djiwa Ketetapan MPRS No. XV/ MPRS/66 dgn tidak

mengurangi maksud dan jiwa UUD 45” (Wedhaswary, V. F., 2020).

Soe Hok Gie mengungkapkan kebahagiaan karena telah berhasil menggerakkan mahasiswa untuk melakukan *long march* guna menyuarakan pendapat untuk menuntut pemerintah. *Long march* yang diikuti oleh 200 mahasiswa serta para pelajar dan masyarakat bisa berakhir dengan baik (Suastiani, 2014).

Oleh karena itu, Gerakan mahasiswa yang dibawa oleh Soe Hok Gie ini memiliki dampak terhadap perbaikan kehidupan masyarakat dan dunia kampus, baik dari segi sosial dan politik. Dalam kehidupan masyarakat terjadinya modernisasi yaitu perubahan kondisi ekonomi dari masa orde lama ke masa orde baru mengalami kemajuan dan pada kondisi politik meningkatnya kesadaran politik di masyarakat dan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam kehidupan kampus terjadi proses pemulihan kehidupan kampus yang normal. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana aksi gerakan mahasiswa Indonesia serta peran Soe Hok Gie di dalamnya, maka penulis melakukan penelitian mengenai rumusan dan pembahasannya dengan judul “Gerakan Mahasiswa Indonesia: Peran Soe Hok Gie Tahun 1960-1969”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Marc Bloch. Ada empat tahap yang perlu dilakukan dalam metode sejarah menurut Marc Bloch, yaitu: *pertama*, merumuskan masalah, pada tahap ini penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana latar belakang Gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1960-1969, bagaimana peran Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1960-1969, dan bagaimana dampak Gerakan mahasiswa Indonesia terhadap politik nasional 1960-1969, penulis juga melakukan observasi historis, yakni sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; *kedua*, melakukan kritik sejarah atau pengujian data secara ekstern dan intern dengan menganalisis dan mengevaluasi sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peran Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1960-1969 yang bertujuan untuk memastikan keaslian dan kredibilitas sumber-sumber sejarah yang digunakan; *ketiga*, melakukan generalisasi atau kategorisasi data sesuai permasalahan penelitian dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang terkait dengan peran Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1960-1969, yang bertujuan untuk memahami peran Soe Hok Gie dalam konteks yang lebih luas; dan *keempat*, melakukan pencarian (analisis) sebab-akibat dari masalah yang diteliti dan ditulis, dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1960-1969. Pencarian sebab-akibat ini bertujuan untuk memahami mengapa Soe Hok Gie berperan penting dalam gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1960-1969 (Zou, Y, 2023).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang menekankan pada literatur atau bahan pustaka yang dijadikan sumber data utama dalam pelaksanaan penelitian. Bahan pustaka yang dimaksud di sini dapat berupa buku, artikel, makalah, majalah, rekaman dan lain-lain. Namun di dalam penelitian ini penulis hanya menargetkan temuan data atau informasi yang berasal dari Buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Penulis tidak hanya berorientasi pada data atau informasi yang berasal dari satu sumber saja namun juga mengumpulkan dari banyak sumber yang kemudian digabungkan menjadi temuan data/informasi yang lebih jelas dan akurat (Asmendri, M.S, 2020).

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, apabila data telah terkumpul maka diadakan penyelesaian terhadap data tersebut dengan menganalisa dan mengkritik data yang ada baik secara Internal maupun Eksternal. kritik internal menelusuri tentang kesahian sumber sedangkan keabsahan sumber ditelusuri melalui kritik Eksternal. Hal ini dilakukan agar diperoleh

data yang kredibel (Suryadinata, Y. D, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1960-1969

Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, etnis, agama, dan telah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun stabilitas politik dan sosial sepanjang sejarahnya. Di saat kepemimpinan presiden pertama yaitu Soekarno, ia memperkenalkan sebuah system politik yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Sukarno mengklaim sistem ini didasarkan pada tradisi musyawarah dan mufakat di tingkat desa yang dipimpin oleh para tetua. Namun, secara nasional, ini berarti pemerintahan di bawah kendali Sukarno, dengan kekuasaan besar atas kebebasan sipil dan norma-norma demokrasi, serta dominasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kekuatan utama (Neti Suzana, 2016).

Dengan dukungan militer, Sukarno memproklamasikan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 dan membentuk kabinet yang mewakili semua partai politik besar, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) (Supriyatna, 2007). Ternyata Demokrasi Terpimpin belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 22 Juli 1959, Soekarno malah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Dekrit Presiden, yang anggotanya dipilih langsung oleh Soekarno dengan tugas yang terbatas. Sehingga Keputusan sangat dipengaruhi oleh Soekarno, contohnya sidang MPRS 1960 menetapkan Manipol-USDEK sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Sidang Umum MPRS 1963 yang mengangkat Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup (Notosusanto. N, 1985).

Menjelang akhir tahun 1960, Sukarno memasukkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kabinet, sesuai dengan ajaran Nasakom, yaitu asas kerja sama antara golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis yang dianggapnya esensial untuk mencapai persatuan nasional. Nasakom diidentikkan dengan Pancasila, sehingga siapa pun yang menerima Pancasila dianggap juga menerima Nasakom (Maxwell. J, 2001).

Saat Sukarno memperkenalkan Manipol-USDEK, pemerintah menjadikan universitas dan mahasiswa sebagai sasaran utama indoktrinasi politik. Meskipun ideologi Manipol-USDEK menarik bagi sebagian mahasiswa, yang lain menanggapi dengan permusuhan, karena merasa kebebasan mereka terancam (Feith, H, 1967).

Era Demokrasi Terpimpin ditandai oleh kolaborasi antara pimpinan PKI dan kaum borjuis nasional yang membuat Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa melemah, inflasi terus meningkat, dan korupsi di kalangan birokrat dan militer merajalela. Hal ini mengakibatkan situasi politik yang sangat tidak stabil yang memicu kebencian di seluruh Indonesia, terutama di kalangan buruh, tani, dan mahasiswa (Maiwan. M, 2005).

Tahun 1965 saat perekonomian mengalami kekacauan yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun drastis akibat inflasi yang mencapai 650%. Pemerintah tidak memiliki solusi efektif untuk mengatasi masalah ini dan baru mengeluarkan kebijakan ekonomi pada 13 Desember, yang melemahkan masyarakat. Kenaikan tarif transportasi, biaya pos, dan telekomunikasi yang signifikan sejak awal tahun 1966 sangat membebani keluarga berpenghasilan rendah, yang berdampak pada harga kebutuhan pokok (Thomas, R. S, 1973).

Dan pada tanggal 30 September 1965, sekelompok anggota PKI melancarkan pemberontakan, menculik dan membunuh enam jenderal dan seorang perwira tinggi TNI, yang dikenal sebagai G30S/PKI (Gerakan Partai Komunis Indonesia). Meskipun PKI membantah keterlibatan langsungnya, tapi peristiwa ini menyebabkan penurunan drastis dalam kekuatan PKI dan pembersihan luas terhadap mereka yang dicurigai terlibat atau bersimpati terhadap komunis

(Saleh. N. N, 1992).

Penerapan kebijakan devaluasi rupiah dan kenaikan tarif serta layanan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, ditambah dengan keengganan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap G30S/PKI dan kepatuhannya yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip Nasakom, telah memberikan beban berat bagi rakyat, yang memunculkan kelompok-kelompok menginginkan perubahan. Sehingga mahasiswa jadi turun tangan dan menjadi aktif menentang dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menuntut perubahan besar dalam politik Indonesia. Mahasiswa dan segala gerakannya sangat berperan dalam mengkritik otoritarianisme dan kebijakan yang dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Mereka mendukung langkah-langkah Suharto untuk meredakan ketegangan politik dan memulihkan sistem pemerintahan (G-Ahmaddani, M, 1984).

Pada tahun 1966, sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari personel militer, mahasiswa, dan pelajar terbentuk. Setiap kelompok memiliki misinya. Militer menangkap orang-orang yang terlibat dalam G30S/PKI dan membersihkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta lembaga-lembaga pemerintah. Sementara itu, mahasiswa melakukan kajian ilmiah sebelum melakukan aksi mogok dengan tema-tema yang mudah dipahami masyarakat umum. Mahasiswa melakukan diskusi mengenai ketidaktegasan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi dan politik, yang menghasilkan pernyataan mahasiswa sebagai Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat): turunkan harga, atur ulang kabinet, dan bubarkan PKI. Kesepakatan ini menjadi agenda utama gerakan mahasiswa, yang juga berhasil membentuk organisasi perjuangan bernama KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Mahasiswa melancarkan aksi-aksi yang semakin gencar untuk mendesak berakhirnya rezim Orde Lama, yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan bangsa. Akhirnya gerakan mahasiswa 1966 berhasil mengganti rezim Orde Lama dengan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto (Akbar Tanjung Abyoso, 2015).

Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) kemudia dikeluarkan, yang memberikan Suharto kekuasaan untuk mengambil tindakan darurat, termasuk membubarkan PKI dan memulai proses stabilisasi politik dan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1967, Suharto secara resmi diangkat sebagai pelaksana tugas presiden dan kemudian dilantik sebagai presiden kedua Indonesia pada tahun 1968. Ia mulai mengonsolidasikan kekuasaannya dengan mendirikan rezim Orde Baru (Jamzuri, M, 2025).

2. Peran Soe Hok Gie Dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1960-1969

Soe Hok Gie lahir pada tanggal 17 Desember 1942 di daerah Kebon Jeruk Jakarta. Ayahnya bernama Soe Lie Piet atau Salam Sutrawan seorang penulis dan ibunya Ni Hoei An. Soe Hok Gie merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Sejak kecil Soe Hok Gie mempunyai kegemaran membaca, menulis dan memelihara binatang. Kegiatan menulis dilakukan dengan menulis catatan hariannya dan surat-menyurat dengan teman-temannya. Saudara laki-laki satu-satunya adalah Soe Hok Djien atau Arief Budiman yang juga merupakan pelopor gerakan mahasiswa era 70 an (Feronika, 2025).

Kesadaran Soe Hok Gie terhadap dunia dan sekelilingnya mulai terwujud dalam ekspresi politiknya semasa di SMA. Kritik tajam di alamatkan kepada Presiden Soekarno dan tokoh politik lain yang tertulis dalam catatan hariannya tanggal 10 Desember 1959 yaitu pengalaman melihat orang kelaparan yang mencari sisa-sisa makanan di tumpukan sampah di dekat rumah di Kebon Jeruk. Soe Hok Gie meluncurkan kecaman pedas pada penguasa dengan menulis, "Siang tadi aku bertemu dengan seseorang (bukan pengemis) tengah memakan kulit mangga. Rupannya ia sedang kelaparan. Ini merupakan gejala yang mulai nampak di ibukota. Dan kuberikan uang Rp 2,50 dari uangku dan kuisakan Rp 15, untuk cadangan. Dua kilometer dari sini paduka (yang dimaksud Presiden Soekarno) kita mungkin sedang tertawa dan makan dengan istri-istrinya yang cantik-

cantik. Timbul dalam hatiku kebanggaan bahwa generasiku ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau, yaitu koruptor-koruptor tua seperti Iskak, Djodi, Dadjar, dan Ibnu Sutowo, kitalah yang dijadikan generasi yang memakmurkan Indonesia. Yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang dibesarkan zaman Hindia Belanda. Mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang gigih lihatlah Sukarno, Hatta, Syahrir, Ali dan sebagainya. Tetapi kini mereka telah mengkhianati apa yang diperjuangkan. Sukarno telah berkhianat terhadap kemerdekaan. Yamin telah memalsukan (atau masih dalam zaman romantik) sejarah Indonesia. Hatta tak berani menyatakan kebenaran (walaupun kadang-kadang ia menyatakan) dan rakyat makin lama makin menderita" (Soe Hok Gie, 1995).

Keberanian Soe Hok Gie mengungkapkan fakta pada masa itu mungkin bagi sebagian orang saat itu dinilai naif, sembrono, bahkan mungkin tidak sayang nyawa. Tapi bagi seorang Soe Hok Gie, itu adalah panggilan sebagai seorang intelektual, untuk berani menyatakan kebenaran. Ada seorang teman Soe Hok Gie dari Amerika yang menulis surat bahwa Soe Hok Gie akan selalu menjadi intelektual yang bebas tapi juga seorang pejuang yang sendirian. Soe Hok Gie menjawab dengan kata-kata ini, "Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka"-Soe Hok Gie (Soe Hok Gie, 1983).

Pada bulan September 1961 Soe Hok Gie diterima Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Sejarah. Soe Hok Gie juga masuk Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMSos) yang mungkin diwarisi dari pihak ayahnya meskipun tidak menganut suatu ideologi yang jelas dan partai yang jelas tetapi mengidentifikasikan dirinya dengan Partai Sosialis Indonesia (Feronika, 2025).

Ketika Soe Hok Gie menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, Soe Hok Gie yang memiliki sikap yang sama dengan sahabatnya Zainal Zakse, sebagai seorang yang sama-sama tidak menyukai pola kebijakan dan pemerintahan yang dilakukan Soekarno, mereka mulai mengecam pola Demokrasi Terpimpin yang dianggap sebagai kemunafikan dan kepicikan (Maxwell. J, 2001).

Sehingga penyimpangan-penyimpangan pola pemerintahan yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin dibawah kepemimpinan Soekarno merupakan awal keinginan Soe Hok Gie untuk bisa menjatuhkan rezim orde lama. Untuk itu, strategi menjatuhkan Soekarno telah dilakukan sejak tahun 1961 dengan melakukan kerjasama dengan Prof. Soemitro Djoyohadikusumo dengan "Gerakan Pembaharuan Indonesia". Selain dengan Prof. Soemitro Djoyohadikusumo juga melakukan kerjasama dengan pihak militer, melalui hubungannya dengan Nugroho Notosusanto, Soe Hok Gie dekat dengan kalangan militer. Kedekatan dengan pemimpin SSKD (dalam perkembangannya menjadi SESKOAD yaitu sekolah yang mendidik kaum cendekiawan dari militer yang diarahkan menjadi pemimpin negara) inilah salah satu cikal bakal hubungan militer dengan aksi mahasiswa Angkatan 66 (Soe Hok Gie, 1983).

Saat terjadinya peristiwa G30 S/PKI yang menewaskan 7 Jenderal, mereka mengklaim bahwa mereka bertindak untuk melindungi Presiden Sukarno dari "Dewan Jenderal" sayap kanan yang bermaksud merebut kekuasaan. Tapi pada hari angkatan bersenjata, mereka mendapatkan tindakan tegas dari Mayor Jendral Soeharto sehingga usaha kudeta dapat digagalkan (Soe Hok Gie, 1995a).

Sehingga terjadi pembantaian massal terhadap PKI oleh tantara. Melihat hal itu, Soe Hok Gie protes dengan mengungkapkan kebenaran dan ikut mengumpulkan data-data mengenai hal tersebut. Soe Hok Gie menggunakan nama samara "Dewa" untuk dua artikel yang berhubungan dengan pembunuhan massal di Bali. Artikel yang ditulis berisikan pembelaan Soe Hok Gie terhadap hukum, keadilan dan kemanusiaan (Badil, 2016). Tidak hanya itu, Soe Hok Gie mendatangi daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Disana Soe Hok Gie mengumpulkan data dan melihat langsung peristiwa pembunuhan. Melihat hal tersebut, Soe Hok Gie mencoba untuk menghentikan

tindakan yang tidak berperikemanusiaan itu. Melalui berbagai media, Soe Hok Gie berusaha untuk membujuk pimpinan tentara di Jawa Tengah dan pemerintahan pusat agar segera menghentikan pembunuhan itu (Badil, dkk, 2016).

Tapi di lain sisi peristiwa G30S/PKI, ternyata Presiden Soekarno tidak memberikan jalan keluar yang tegas. Pidatonya membuat situasi mengambang dan menjadi tidak menentu. Peristiwa G30S/PKI dengan puncaknya drama Lubang Buaya, Presiden Soekarno mengatakan agar rakyat tidak membesar-besarkan peristiwa tersebut, sebab kejadian itu hanya sekedar riak-riak kecil dalam samudra yang luas (*een rimpeltje in de ocean*). Hal ini membuat rasa kecewa bagi sebagian besar masyarakat (Notosusanto. N, 1985).

Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1965, Presiden mengatakan, "Nasakom akan tetap hidup selagi saya hidup". Pidato-pidato Presiden Soekarno tersebut diartikan sebagai pembelaan terhadap PKI oleh sebagian besar rakyat dan ABRI, sehingga menyebabkan wibawa dan popularitas Presiden Soekarno dari hari ke hari menurun (Moedjanto, 1998). Untuk menanggapi kejadian ini, PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) menggelar rapat presidium. Rapat itu dihadiri oleh para golongan muda, termasuk mahasiswa, khususnya yang ada di Jakarta (Indrawati, V, 2022).

Pada bulan Desember 1965 menteri Gestapu malah mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru, yang dikenal dengan Tindakan Pemerintah di bidang Moneter. Dalam peraturan tersebut rupiah Indonesia diberikan nilai baru Rp. 1000, 00 disamakan dengan Rp. 1, 00 baru, uang kertas Rp. 10.000, 00 dan Rp. 5000, 00 ditarik dari peredaran dalam jangka waktu satu bulan dengan dikenakan potongan pajak 10%. Kebijakan tersebut menghasilkan kapanikan yang luar biasa dimasyarakat terlebih saat merupakan hari Lebaran, Natal, dan tahun baru Tionghoa sehingga kenaikan harga barang terjadi tanpa kendali di pasaran. Mahasiswa juga mengalami dampak atas kebijakan tersebut, terutama dengan naiknya tarif kendaraan umum. Harga bensin dalam waktu satu setengah bulan naik dari Rp. 4, 00 menjadi Rp. 1000, 00 per liter (Soe Hok Gie, 1983).

Sehingga Januari 1966 ketika Soe Hok Gie mendengar rencana untuk menentang kenaikan tarif bis dari seorang temannya, Ismid Hadad yang bertugas pada Biro Penerangan KAMI. Soe Hok Gie dan Herman Lantang segera pergi kerumah Drs. Nugroho Notosusano untuk meminta persetujuan atas aksi yang akan mereka lakukan bersama KAMI di pusat (Maxwell. J, 2001).

Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1966, beberapa ribu mahasiswa bergabung dengan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) untuk melakukan demonstrasi ke Sekretariat negara. Soe Hok Gie selalu ikut serta dalam aksi-aksi yang diselenggarakan KAMI. Soe Hok Gie bersama dengan KAMI berkumpul di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk memprotes kenaikan harga, dan meminta kebijakan moneter ditinjau kembali. Di sana mereka bukan diterima baik-baik namun diterima dengan panzer dan bayonet. Berkat disiplin yang tinggi dari mahasiswa yang membuat tidak terjadi suatu insiden. Dr. Chaerul Saleh menolak manemui mahasiswa, tetapi mahasiswa tetap tidak mau pulang. Mereka bersembahyang di jalan-jalan raya, sambil menantikan Dr. Chaerul Saleh keluar kantor. Pukul 16.00 Dr. Chaerul Saleh akhirnya keluar dan membuat pidato pendek. Para demonstran pun bergerak menuju ke SEKNEG namun, saat itu Soe Hok Gie tidak ikut ke SEKNEG karena harus pergi ke Rawamangun untuk mengikuti rapat senat. Hasil dari rapat tersebut adalah tanggal 12-19 Januari dinyatakan sebagai "Minggu Berkabung" dan setiap mahasiswa Fakultas Sastra disarankan untuk memboikot bus sebagai tindakan protes terhadap tindakan Pemerintah (Soe Hok Gie, 1983).

Pada 11 Januari sekelompok mahasiswa berjumlah lima puluh orang dari Fakultas Sastra yang dipimpin Soe Hok Gie dan Herman Lantang bergerak menuju Rawamangun dari kampus UI pusat sejauh empat kilometer untuk mengacaukan lalu-lintas dan di Rawamangun diadakan

pertemuan mahasiswa yang dihadiri seluruh mahasiswa. Dalam rapat ini Soe Hok Gie memberikan pengumuman bahwa rencana senat untuk mengadakan demonstrasi selama sepekan sebagian telah diputuskan sehari sebelumnya. Sekitar dua ratus orang bergabung dengan kelompok mahasiswa lain untuk melakukan aksi serupa. Aktivitas lalu lintas disekitar kampus UI dihambat, kendaraan yang lewat dicoret-coret dengan tulisan anti pemerintah dan malah menulis slogan Tritura. Sebagai arsitek dari aksi ini Soe Hok Gie juga mempunyai tujuan agar masyarakat luas mengetahui bahwa mahasiswa tidak hidup di menara gading seperti yang diduga orang. Kebangkitan mahasiswa untuk melakukan *long march* menunjukkan bahwa mahasiswa adalah "*the happy selected few*" yang dapat kuliah sehingga harus melibatkan diri dalam usaha memperbaiki bangsanya (Soe Hok Gie, 1995b).

12 Januari beberapa puluh ribu mahasiswa telah berjalan kaki dari kampus Universitas Indonesia dan kampus Salemba ke kantor DPR-GR di Senayan yang kurang lebih 15 km jauhnya. Di bawah terik matahari mereka menyampaikan tututannya kepada "wakil-wakil rakyat". Mahasiswa diterima oleh Arudji Karta winata yang akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada presiden (Soe Hok Gie, 1983).

Sementara itu rakyat Ibu Kota sudah memenuhi jalan-jalan yang akan dilalui oleh pawai besar "pamer kekuatan" (*show of force*) yang dilakukan ABRI, khususnya pasukan RPKAD dan pasukan Kujang dari Divisi Siliwangi. Perhatian masyarakat juga tertuju pada para mahasiswa KAMI yang terbagi dalam kesatuan-kesatuan Laskar Ampora dengan menaiki barisan panser dan tank-tank raksasa, sambil mengibarkan panji-panji KAMI sebagai tanda kemenangan (Soerjadi, 1988). Aksi-aksi ini semakin intensif, para mahasiswa menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah gerakan moral yang dibentuk untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kebenaran. Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka Ketua Presidium KAMI, Cosmas Batubara, menyatakan bahwa aksi-aksi mahasiswa akan terus berlanjut sampai PKI dibubarkan. Semakin lama gerakan mahasiswa dalam KAMI semakin brutal. Mereka membakar kantor pusat PKI dan rumah-rumah warga juga dihancurkan (Maxwell, J, 2001).

Tanggal 13 Januari Soe Hok Gie dan sebagian mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan Sastra melakukan aksi bersepeda sambil bernyanyi mengumandangkan slogan penentangan terhadap pemerintah dan juga menempelkan pesan-pesan Tritura kepada masyarakat. Tujuan lainnya adalah mengacaukan lalu lintas guna memperoleh perhatian lebih serius oleh pemerintah (Maxwell, J, 2001).

Presiden Soekarno juga melakukan usaha menyerang balik gerakan mahasiswa tersebut, dengan mengundang dan mempertemukan mahasiswa dengan para menteri yang menjadi sasaran demonstrasi. Para menteri hanya menjadi pendengar pidato Soekarno dengan tidak menggubris resolusi yang ditawarkan mahasiswa mengenai pembubaran PKI dan penurunan harga. Malam harinya Soe Hok Gie tidak mau melewatkan waktu begitu saja, ia mengisi waktu dengan menulis beberapa artikel (karena malam itu Soe Hok Gie menginap di Kompas) mengenai gerakan mahasiswa agar tetap memperjuangkan amanat rakyat. Alasan Soe Hok Gie menulis artikel ini agar mahasiswa tetap meneruskan gerakannya bukan hanya karena alasan menuntut penurunan harga bensin tetapi juga harus dilandasi pembelaan kebenaran dan keadilan. Sayangnya, artikel tersebut ditolak redaksi Kompas, dengan alasan membahayakan posisi koran yang menerbitkan (Soe Hok Gie, 1983).

Dalam media mingguan "Mahasiswa Indonesia", Soe Hok Gie menguraikan tentang siaran Radio Ampora Ia berbicara secara jujur tentang berbagai persoalan, Ia menyerang Soekarno (pada waktu semua orang masih pura-pura menjilatnya), Ia menyerang Ruslan Abdulgani dan Leimena (yang masih jadi Waperdam), dan menyerang Ibnu Sutowo (yang dianggap korupsi), Ia juga menggugat Mas Agung, Darmosugondo, Hartini dan semuanya yang dianggap tidak benar (Soe

Hok Gie, 1995b).

Setelah periode aksi demonstrasi berjalan, mahasiswa mulai mendapat tekanan dari barisan pendukung Soekarno. Organisasi kemahasiswaan yang pro Soekarno seperti GMNI, GSNI, Gema Bung Karno hingga organisasi muda PNI mulai memberikan perlawanan baik secara psikis maupun fisik. (Maxwell, Sukarno and The Indonesian Revolution, 2001) Ancaman sanksi akademik juga datang dari pihak universitas yang mengultimatum untuk segera menghentikan mogok kuliah dan aksi demonstrasi. Menghadapi hal ini, KAMI sebagai komando tertinggi dalam aksi demonstrasi mengambil langkah kompromistis dengan menuruti kemauan Soekarno. Langkah kompromi terpaksa diambil pemimpin KAMI karena KAMI mendapat tekanan hebat dari pemerintah, dimana pemimpin KAMI pusat sempat ditangkap, dan kantornya dipindahkan ke markas Kostrad (Anwar, Y, 1984).

Tapi, Soe Hok Gie menolak instruksi KAMI maupun instruksi Presiden Soekarno, bersama massa dari FSUI dan berbagai kelompok mahasiswa lainnya, Soe Hok Gie menyuarakan upaya perlawanan terhadap perintah Soekarno. Soe Hok Gie kemudian menjalin komunikasi dengan berbagai aktivis mahasiswa lain dari KAMI Jaya dan KAMI UI untuk terus melakukan aksi demonstrasi. Bersama tiga fakultas yang masih independen, Soe Hok Gie membangun markas di gedung Fakultas Kedokteran UI. Aksi demonstrasi diwarnai aksi kekerasan dan konfrontasi fisik dengan barisan pendukung Soekarno. Soe Hok Gie menemui Kepala Staf Kostrad Brigjend Kemal Idris, Perwira Intelijen KOTI Brigjend Yoga Sugama dan beberapa perwira lain dari Angkatan Darat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa militer akan membantu baik secara materi maupun fisik kepada aksi mahasiswa. Kesepakatan antara Soe Hok Gie dan militer kemudian dibawa kepada Marsilam Simanjuntak yang merupakan pemimpin KAMI Jaya (Patrik Diego Arbi Arwendi, Agus Widodo, 2024).

Saat demonstrasi mahasiswa berjalan, Soe Hok Gie tetap berada di garis depan sebagai salah satu suara kritis yang mempertahankan idealisme gerakan mahasiswa. Ia percaya bahwa gerakan mahasiswa harus tetap independen dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak manapun, termasuk militer, yang mulai berkolaborasi dengan mahasiswa pada masa itu. Kemudian KAMI menggelar demonstrasi lagi di depan Istana Negara, massa pun berujung bentrok dengan Resimen Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden), yang menewaskan salah satu demonstran dari Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim pada tanggal 24 Februari 1966. Akhirnya, karena kondisi yang sudah tidak kondusif lagi, Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan KAMI pada 26 Februari 1966 (H. Maulwi Saetan, 2008).

Meskipun KAMI secara resmi dibubarkan, namun pembubaran ini tidak menghentikan aksi-aksi mahasiswa. Mereka terus melakukan demonstrasi dengan dukungan dari kelompok pemuda, pelajar, dan unsur militer yang berseberangan dengan Soekarno. Pada tanggal 4 Maret 1966, mahasiswa militan membentuk laskar Arif Rahman Hakim. Laskar ini digunakan sebagai pengganti KAMI, dengan struktur dan pembagian wilayah yang hampir sama dengan KAMI. Soe Hok Gie bersama Fahmi Idris, Hakim Sorimuda dari HMI dan banyak aktivis mahasiswa yang lain, menggunakan laskar ini untuk merancang aksi demonstrasi yang lebih destruktif. Keadaan kacau yang dihasilkan oleh Laskar akhirnya mampu memberi kesempatan kepada militer untuk segera bergerak. Di bawah kepemimpinan Soeharto, militer mulai bergerak menekan Soekarno (Maxwell, J, 2001).

Situasi menjadi semakin genting ketika mahasiswa terus mendesak pemerintah dengan aksi-aksi yang semakin masif. Pada 11 Maret 1966, saat Soekarno menghadiri sidang kabinet, suasana di Jakarta sangat tegang dengan kehadiran pasukan bersenjata. Dalam kondisi tertekan, Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang memberikan

kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara (Patrik Diego Arbi Arwendi, Agus Widodo, 2024).

Pada tanggal 12 Maret 1966, Presiden membacakan surat perintah itu di hadapan para panglima Angkatan Laut, Udara, dan Kepolisian di istana. Setelah keluarnya Supersemar, mahasiswa terus melanjutkan aksi mereka untuk memastikan tuntutan Tritura terpenuhi. Gerakan mahasiswa akhirnya berhasil membawa perubahan besar dalam politik Indonesia, mengakhiri era Demokrasi Terpimpin, dan membuka jalan bagi pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto (Wibisono. S, 2010).

Pada tanggal 18 Maret 1966 Letjend Soeharto segera merespon tuntutan mahasiswa, dengan mengambil tindakan pengamanan (penahanan) terhadap 15 orang menteri yang terindikasi dalam petualangan G30S/PKI atau yang diragukan iktikad baiknya dalam menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden. DPR-GR juga melakukan pemecatan terhadap 63 anggota PKI. Sementara di pihak Kepolisian juga mengadakan pembersihan dengan membebastugaskan sebanyak 384 anggota Kepolisian dan 49 karyawan sipil yang bekerja pada dinas Kepolisian (Soerjadi, S., 1988).

Soekarno menyadari bahwa kedudukannya sudah goyah, pada tanggal 20 Februari 1967 mengumumkan Kami Presiden Republik Indonesia/ Mandataris MPRS/ Panglima Tertinggi ABRI, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan Pemerintahan kepada Pengemban ketetapan MPRS No. IX/MPRS/66 Djenderal TNI Suharto, sesuai dengan djiwa Ketetapan MPRS No. XV/ MPRS/66 dgn tidak mengurangi maksud dan djiwa UUD 45 (Wedhaswary V. F., 2020). Meskipun demikian Sidang Istimewa MPRS tetap berlangsung. Jenderal Soeharto memenuhi resolusi DPR-GR dan permintaan MPRS dengan menerangkan bahwa Presiden Soekarno bukan komunis, tetapi karena keyakinan pada Nasakom, Presiden menjadi pelindung dan pembela PKI (Anwar, Y, 1984).

Melalui berbagai aksi jalanan yang dilakukan berbagai kelompok yang bergabung dengan KAMI, KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dan dengan bantuan angkatan darat, berhasil melengserkan penguasa saat itu. Soe Hok Gie adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan anak muda yang berhasil menurunkan jabatan Presiden Soekarno. Soe Hok Gie menjadi penghubung antara kelompok mahasiswa Jakarta dan Bandung. Menurut Soe Hok Gie, pemerintahan Presiden Soekarno tidak bekerja dengan baik dan sangat terkenal dengan praktek korupsi. Pemerintahan tersebut tidak menghormati hak asasi manusia (Badil, dkk, 2016).

Soe Hok Gie mengungkapkan kebahagiaan karena telah berhasil menggerakkan mahasiswa untuk melakukan *long march* guna menyuarakan pendapat untuk menuntut pemerintah. Jaket kuning UI yang menonjol dalam perjuangan menegakkan orde baru yakni *long march* 1966 disebabkan karena massa KAMI yang tersebar di UI. *Long march* yang diikuti oleh 200 mahasiswa serta para pelajar dan masyarakat bisa berakhir dengan baik (Suastiani, 2014).

Tetapi ternyata KAMI pun mulai terjun dalam aktivitas politik ketika terdapat wacana untuk memberikan posisi permanen bagi mahasiswa dalam kekuatan politik Orde Baru. Delegasi pemimpin KAMI akhirnya masuk dalam susunan anggota MPRS/DPR-GR. Terdapat 14 perwakilan pemimpin KAMI yang masuk dalam susunan anggota MPRS/DPR-GR. Sebagian besar perwakilan merupakan pengurus KAMI Pusat dan KAMI Jaya. Terdapat pula salah satu tokoh pers mahasiswa yang juga masuk dalam parlemen. Soe Hok Gie secara radikal menolak penunjukkan 14 perwakilan mahasiswa untuk duduk dalam kursi MPRS/DPR-GR. Pertimbangan yang dikemukakan Soe Hok Gie dalam penolakannya adalah Ketika perjuangan mahasiswa telah membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, sudah seharusnya mahasiswa mundur dan kembali pada aktivitas akademiknya. Mahasiswa tidak seharusnya mengharapkan imbalan berupa

jabatan (Nugroho, A. I, 2016).

Pasca pengangkatan Suharto sebagai presiden tepatnya pada awal April 1967, Soe Hok Gie merupakan tokoh yang mengkampanyekan agar mahasiswa kembali ke tugas awalnya untuk meneruskan studi. (Maxwell, Sukarno and The Indonesian Revolution, 2001) Sehingga Soe Hok Gie melancarkan kritik kepada KAMI lewat surat kabar dan siaran Radio Ampera. Di Radio Ampera, Soe Hok Gie bersama kakaknya yaitu Soe Hok Djin. Melakukan siaran pada tanggal 5-6 April 1967 dengan judul siaran “Awat Penyakit Pahlawan Gadungan”. Kritik-kritik dilancarkan Soe Hok Gie terhadap aktivitas KAMI di parlemen, terus menerus hingga menjelang akhir hidupnya. Puncak dari kritiknya adalah mengirimkan hadiah natal dan lebaran bagi perwakilan mahasiswa di parlemen. Dua teman baik Soe Hok Gie ikut pula mendapat kiriman paket ini, yaitu Nono Anwar Makarim dan Rahman Tolleng. Nono Anwar Makarim adalah redaksi Harian KAMI, sedangkan Rahman Tolleng adalah teman seorganisasi Soe Hok Gie di Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) (Maxwell, J, 2001).

Soe Hok Gie adalah sosok idealis yang seakan tidak pernah takut kepada siapa pun selama yakin dengan sikapnya. Bahkan Soe Hok Gie siap berhadapan dengan penguasa jika memang penguasa tersebut berbuat sesuatu yang dianggapnya tidak adil. (Badil, 2016) Boleh dikata bahwa perjuangan Soe Hok Gie tak sepenuhnya mudah. Ia memiliki banyak musuh. Upayanya untuk menjatuhkan Soekarno ternyata bukanlah suatu pencapaian terakhir. Ia harus berhadapan dengan rezim Soeharto (Orde Baru) yang ternyata tak lebih baik dari rezim sebelumnya. Ia merasakan keresahan ketika terjadi banyak peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada anggota ex-PKI di Jawa dan Bali. Ia bahkan bertolak belakang dengan teman-temannya yang pernah berjuang bersama dalam pergerakan mahasiswa Angkatan 66 karena mereka menjilat keuntungan dari pemerintahan Soeharto. Banyak dari temannya yang mendapat pundi-pundi kekayaan dari keterlibatan mereka dalam politik praktis di pemerintahan Soeharto (Santosa. s. d, 2005).

Soe Hok Gie barangkali merupakan salah satu intelektual muda paling awal yang berani bersuara dan memprotes penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) terhadap para bekas anggota PKI. Kepedulianya kepada penderitaan banyak orang membuatnya dikenal sebagai sosok pejuang kemanusiaan yang gigih dan berani. Ideologi yang dekat dengan dirinya bukan lagi komunis dan sosialis, ia berusaha melampaui kedua hal tersebut, yaitu dinamakan ideologi humanis. Soe Hok Gie adalah pemuda yang memiliki empati dan keberpihakan pada rakyat kecil. Ia juga adalah seorang humanis yang memimpikan dunia tanpa perang, bebas dari kebencian dan pembunuhan atas nama dan alasan apa pun (Patrik Diego Arbi Arwendi, Agus Widodo, 2024).

Soe Hok Gie dikenal sebagai penulis produktif di beberapa media massa, misalnya Kompas, Harian KAMI, Sinar Harapan, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Raya Sekitar 35 karya artikelnya (kira-kira sepertiga dari seluruh karyanya) selama rentang waktu tiga tahun masa awal berdirinya Orde Baru. (Maxwell, Sukarno and The Indonesian Revolution, 2001) Di sisi lain kehidupannya, Soe Hok Gie yang alim dan badannya kecil ini punya *hobby* yang agak nyentrik saat itu, yaitu mendaki gunung. Soe Hok Gie telah menaklukkan beberapa gunung di pulau Jawa. Kegiatan dilakukan untuk ajang melepas penat dari kegiatan politik yang terus menyita waktu dan pemikirannya (Feronika, 2025).

Jauh sebelum kegiatan mendaki gunung itu populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Soe Hok Gie, Herman Lantang, Maulana, Koy Gandasuteja, dan kawan-kawannya yang lain menjadi perintis berdirinya MAPALA UI (Mahasiswa Pecinta Alam), sebuah organisasi pecinta alam yang sampai saat ini aktif sebagai salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di

Universitas Indonesia. Ada satu penggalan kata-kata Soe Hok Gie ketika dia ditanya apa alasan dan tujuannya mendirikan organisasi pecinta alam ini: “Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan, Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal obyeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung.” -Soe Hok Gie (Mochtar Lubis, 1969).

Memasuki 1969 adalah tahun terakhir Soe Hok Gie menjadi mahasiswa dan pada bulan September bahkan sudah resmi menjadi Dosen Jurusan Sejarah. Saat Soe Hok Gie dan kawan-kawan Mapala UI melakukan pendakian di Gunung Semeru tepat pada 16 Desember 1969, Soe Hok Gie dan salah seorang kawan mendaki yakni Idhan Lubis meninggal dunia akibat menghirup gas beracun ketika berada di puncak Semeru (Suastiani, 2014).

3. Dampak Gerakan Mahasiswa Indonesia Terhadap Politik Nasional Tahun 1960-1969

a. Peralihan Kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru

Masa pemerintahan Orde Lama tepatnya ketika demokrasi terpimpin diterapkan, navigasi politik Indonesia di bawa ke arah sistem politik bercorak otoriter-totaliter, salah satu episode kelam dalam sejarah politik Indonesia. Mahasiswa menilai jalannya pemerintahan Orde Lama tidak sesuai dengan mekanisme demokrasi, terlebih kedekatan penguasa dengan kelompok kiri dinilai memperburuk situasi politik (Gili Argenti, 2023).

Setelah kejadian pemberontakan G30S mahasiswa menuntut adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi pemberontakan yang dituduhkan pada partai PKI. Tetapi sikap pemerintah khususnya Presiden Soekarno yang mengambang membuat mahasiswa semakin geram. Para mahasiswa menganggap bahwa Presiden Soekarno terlalu lamban dalam menyelesaikan persoalan PKI (Kuswono, L. B., 2020).

Melalui Gerakan Pembaharuan yang digagas eksponen Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) yang di pelopori Soe Hok Gie terlibat dalam gerakan bawah tanah menggulingkan pemerintahan Orde Lama. Kegiatan Gerakan Pembaharuan mengkampanyekan perlawanan politik terhadap pemerintah melalui kegiatan diskusi dan selebaran gelap, tujuannya pembentukan opini di tengah-tengah masyarakat mengenai kebobrokan pemerintah (Gili Argenti, 2023)

Mulai tanggal 12 Maret 1966, setelah Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jendral Soeharto, mahasiswa Indonesia mempunyai pengaruh yang amat besar. Rakyat menghormatinya karena tanpa mahasiswa, tiran Soekarno masih berkuasa. Tentara Indonesia (yang mempunyai perwira-perwira korup, di samping yang baik) juga takut pada mahasiswa. Belum pernah dalam sejarah Indonesia, mahasiswa-mahasiswa mempunyai pengaruh politik yang demikian besar. Tokoh-tokoh mahasiswa menjadi tokoh-tokoh nasional (Soe Hok Gie, 1983).

Dengan kekuatan, keberanian dan kebersamaan yang dimiliki oleh mahasiswa mereka mampu membuat sebuah Gerakan besar yang sering disebut sebagai gerakan mahasiswa Indonesia Angkatan 66 yang memberikan peran penting terhadap negara kita ini. Mereka menjadi salah satu faktor penting dalam menggagalkan pemerintahan orde lama, mendukung transisi ke orde baru dan menjadi suara kritis bagi pemerintah dan masyarakat. Gerakan mahasiswa berperan sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan pemerintah, mereka memberi kritik dan saran dalam memperbaiki kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak rakyat terpenuhi.

Gerakan mahasiswa angkatan 66 membuat semua golongan masyarakat maupun organisasi lain mulai menghormati kalangan mahasiswa. Mereka dianggap mempunyai peran besar serta keberanian melawan kekuasaan tunggal Soekarno. Sebuah perjuangan hak demokrasi yang berhasil untuk menghadapi kediktatoran dari Presiden Soekarno. Mata masyarakat terbuka bahwa kaum intelektual mempunyai kekuatan yang besar, yang kemudian harapan untuk masyarakat yang lebih baik dan makmur kedepannya. Mahasiswa kemudian dianggap sebagai penerus perjalanan panjang bagi negara yang besar ini (Kuswono, L. B., 2020).

b. Meningkatkan Kesadaran Politik Di Masyarakat Sehingga Pemerintah Lebih Responsif

Angkatan 66 membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, mereka menjadi lebih aktif dalam mengikuti perkembangan politik dan lebih berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik ini juga tercermin dalam peningkatan jumlah pemilih dalam pemilihan umum. Pada masa Orde Lama, pemilu tahun 1955 diikuti oleh sekitar 37 juta pemilih. Sementara itu, pada masa Orde Baru, pemilu tahun 1971 diikuti oleh sekitar 54 juta pemilih, dan pada pemilu-pemilu selanjutnya, jumlah pemilih terus meningkat hingga mencapai sekitar 93 juta pemilih pada pemilu tahun 1987 (Komisi Pemilihan Umum (KPU), t.t.).

Karena Soekarno meninggalkan Indonesia dengan keadaan politik dan ekonomi yang kacau dengan inflasi yang sangat tinggi dan utang luar negeri yang membebani kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Indonesia harus membangun kembali dari puing-puing keruntuhan ekonomi. Sehingga melalui tekanan massa dan opini publik yang dihasilkan oleh gerakan mahasiswa angkatan 66, pemerintah orde baru yang dipimpin Soeharto juga terdorong untuk merumuskan kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat (Ramaino. A. D, 2023).

Pemerintah membuat kebijakan politik yang baru dengan tujuan untuk membangun ekonomi dan menciptakan stabilitas dan keamanan nasional. Salah satunya pemerintah mulai terlihat melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, terutama dalam mengatasi inflasi. Pada saat itu, pemerintah membuat strategi jangka pendek dan jangka panjang agar pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Program jangka pendek yaitu stabilisasi yang dilakukan berupa pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melonjak, dan rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi fisik terhadap prasarana dan alat-alat produksi yang mengalami kerusakan. Program jangka pendek ini membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula sebesar 650 persen mulai menurun menjadi 120 persen di tahun 1967 dan 80 persen di tahun 1968. Program jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru adalah perencanaan pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Hasil dari program itu menumbuhkan tingkat produksi beras dari 20,6 juta ton menjadi 25,8 juta ton di tahun 1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) pada tahun 1985. Di lain sisi, kualitas SDM Indonesia di masa orde baru mulai meningkat seiring banyaknya anak-anak yang bersekolah (Indira Lintang, 2023).

Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melakukan perubahan besar dalam ekonomi Indonesia dengan menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi. Dimana pemerintah mengurangi campur tangan dalam ekonomi dan membiarkan pasar yang menentukan arah ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan menciptakan persaingan yang sehat (Ramaino. A. D, 2023). Perubahan ini menjadi respons terhadap tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang lebih demokratis dan berorientasi pada rakyat.

c. Penguatan Peran Mahasiswa Sebagai Agen Moral Dalam Politik Nasional

Dilihat kembali dalam sejarah di Indonesia, dasar perubahan khususnya pada dunia politik banyak dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa terbukti mampu menjadi pelopor dalam sejarah Bangsa. Mahasiswa sebagai tumpuan berbagai pihak. Mereka sering disebut sebagai harapan bangsa, harapan negara, harapan masyarakat, harapan keluarga bahkan harapan dunia (Yoseph Yermias Patty, 2018).

Angkatan 66 yang telah banyak melalui berbagai tantangan dan penolakan, namun melalui perjuangan dan keteguhan, mereka berhasil memicu perubahan besar dalam sejarah Indonesia dengan menumbuhkan rezim baru. Dengan tekad yang mereka miliki, masyarakat bangga dan menganggap mahasiswa sebagai pewaris masa depan suatu negara, mereka dipercayai tidak hanya memiliki keterampilan untuk bersaing dan membawa nama baik bangsa, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyatukan dan menyampaikan gagasan serta nilai-nilai mereka demi kemajuan bangsa. Mahasiswa menjadi memegang peran penting dalam mengawal konstitusi serta membangun kesadaran dan optimisme politik hukum di Indonesia (Ismaidar dan Rahmah Hayati Sinaga, 2023).

Dalam peran mereka sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat fondasi konstitusi negara dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dipelihara secara konsisten. Ketika berbicara tentang pengawalan konstitusi, mahasiswa bukan sekadar pengamat pasif. Mereka memiliki peran aktif dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah, serta menyoroti setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam konstitusi (Ismaidar dan Rahmah Hayati Sinaga, 2023).

Dari aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa khususnya oleh angkatan 66 memberi dampak langsung kepada mahasiswa untuk memiliki 5 peranan(deepublish store, 2020), yaitu:

- 1) Iron Stock, Mahasiswa berperan sebagai Iron Stock yaitu menjadi individu yang memiliki kapasitas dan moralitas yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Sebagai Iron Stock, peran mereka mendasar sebagai aset, cadangan, dan harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsa.
- 2) Guardian of Value, Mahasiswa berperan sebagai wali nilai-nilai di tengah masyarakat, dimana hal ini mengisyaratkan bahwa mereka diharapkan untuk menjadi akademisi yang berorientasi pada ilmu pengetahuan guna menemukan solusi terhadap setiap persoalan.
- 3) Agent of Change, Mahasiswa yang menjadi Agen Perubahan adalah sosok yang berperan sebagai pendorong suatu transformasi. Mereka merupakan tahap akhir dalam perjalanan pendidikan, memperoleh ilmu yang lebih tinggi untuk menerapkan perannya sebagai inisiator perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, peran mereka sebagai Agen Perubahan mengacu pada harapan bahwa mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara.
- 4) Moral Force, Mahasiswa berperan sebagai pilar moral: Kita menjadi pilar moral bagi negara. Ini berarti bahwa mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman fundamental mengenai perilaku yang etis, termasuk sikap, tindakan, dan komunikasi yang positif.

- 5) Social Control, Mahasiswa sebagai Social Control adalah kita harus berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial. Dalam hal ini adalah mengontrol kehidupan masyarakat, dengan menjadikan diri kita sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

Dengan adanya peranan mahasiswa, ini menjadi bukti keberhasilan gerakan mahasiswa termasuk angkatan 66 dalam mendorong perubahan positif dan pembangunan bangsa, peran ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berperan dalam dunia akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang luas.

KESIMPULAN

Gerakan mahasiswa Indonesia pada periode 1960-an dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi, inflasi tinggi, pembatasan kebebasan, dan krisis politik pasca-peristiwa G30S/PKI. Situasi tersebut mendorong terbentuknya kolaborasi antara personel militer, mahasiswa, dan pelajar. Militer fokus menangkap para pelaku G30S/PKI, sementara mahasiswa berfokus pada kajian ilmiah dan penyebaran informasi untuk menuntut penurunan harga, perombakan kabinet, dan pembubaran PKI, yang dikenal sebagai Tritura.

Salah satu tokoh penting dalam Gerakan Mahasiswa 66 adalah Soe Hok Gie, seorang aktivis dan intelektual dari kampus Universitas Indonesia. Ia dikenal karena tulisan-tulisannya yang kritis terhadap penyimpangan pemerintahan Orde Lama di bawah Sukarno, terutama Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya hipokrit. Sejak 1961, ia telah merancang strategi dengan berbagai pihak untuk menggulingkan rezim yang tidak bermoral. Soe Hok Gie juga berani menentang pelanggaran HAM yang dilakukan militer terhadap mantan anggota PKI. Ideologinya yang humanis menjadikannya pejuang kemanusiaan yang gigih. Setelah penyerahan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto pada 12 Maret 1966, pengaruh mahasiswa meningkat signifikan, dihormati oleh rakyat, dan bahkan ditakuti oleh militer. Keberhasilan gerakan ini berdampak besar, yaitu transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, partisipasi publik dalam politik, serta mengukuhkan peran mahasiswa sebagai agen moral.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar Tanjung Abyoso. (2015). *Bentuk-Bentuk Gerakan Mahasiswa Pada Tahun 1966 Sampai Dengan 1998* [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Andik Matulesy. (2005). Mahasiswa Dan Gerakan Sosial. *Srikandi*, 30.
- Anwar, Y. (1984). Bunga Rampai Sejarah Orde Lama. *Gunung Agung*, 276.
- Asmendri, M.S. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan. *Natural Science*, 41–50.
- Badil, Dkk. (2016). *Soe Hok Gie....Sekali Lagi* (Jakarta). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Deepublish Store. (2020, Oktober 30). *5 Peran Mahasiswa: Sebagai Iron Stock, Agent Of Change, Social Control*.
- Feith, H. (1967). Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin. *Pustaka Sinar Harapan*, 370.
- Feronika. (2025, Januari). Profil Soe Hok Gie. *Merdeka.Com*.
- G-Ahmaddani, M. (1984). *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Fa. Sinar Bahagia.
- Gili Argenti. (2023, Mei 26). Gerakan Mahasiswa Menurut Soe Hok Gie. *Retizen.Republika*.
- H. Maulwi Saelan. (2008). *Kesaksian Wakil Komandan TjakraBirawa: Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*. (Jakarta). Visimedia Pustaka.
- Indira Lintang. (2023, November 30). 5 Perbedaan Pemerintahan Orde Lama Dan Orde Baru.

Inilah.Com.

- Indrawati, V. (2022). *Gerakan Mahasiswa 1966: Kilas Balik Perran Ppmi Dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia*.
- Ismaidar Dan Rahmah Hayati Sinaga. (2023). Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran Dan Optimisme Politik Hukum. *Jurnal Of Social Science Research*, 3, No 6, 10204.
- Jamzuri, M. (2025). Keajaiban Orde Baru Soeharto Di Indonesia. *Indonesia Investmen*.
- Komisi Pemilihan Umum (Kpu). (T.T.). Pemilu Dalam Sejarah. <https://www.kpu.go.id/Page/Read/12/Pemilu-Dalam-Sejarah>.
- Kuswono, L. B. (2020). Peran Soe Hok Gie Dalam Perjuangan Mahasiswa Angkatan 66 Melawan Kekuasaan Pemerintah Orde Baru. *Swarnadwipa*, 3, No. 2, 103.
- Lb. Setiadi. (2020). *Pengaruh Pemikiran Soe Hok Gie Terhadap Munculnya Gerakan Protes Sosial Pada Masa Transisi Orde Lama Ke Orde Baru Tahun 1959-1969* [Skripsi]. Kripsi Universitas Muhammadiyah Metro.
- Maiwan. M. (2005). Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokras*, 32.
- Maxwell, J. (2001). Soekarno: The Untold Story. *Hasta Mitra*.
- Maxwell. J. (2001). Sukarno And The Indonesian Revolution. *Cornell University Press*, 75.
- Mochtar Lubis. (1969). In Memorian: Soe Hok Gie. *Harian Kompas*.
- Neti Suzana. (2016). *Pelaksanaan Politik Mercusuar Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965* [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Notosusanto. N. (1985). *Sejarah Nasional Indonesia Vi: Masa Revolusi Dan Orde Lama*. Balai Pustaka.
- Nugroho, A. I. (2016). Peranan Soe Hok Gie Dalam Dinamika Pergerakan Mahasiswa Tahun 1960-1969. *Risalah: Jurnal Elektrik Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah*, 2, No.7.
- Patrik Diego Arbi Arwendi, Agus Widodo. (2024). Soe Hok Gie: Aktivis Demonstrasi Pengkritik Tirani. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 11 No 4, 1682.
- Ramaino. A. D. (2023). Implikasi Globalisasi Ekonomi Indonesia Dan Pembangunan Ekonomi Pada 1945-2-14. *Dalam Konferensi Internasional Unima Tentang Ilmu Sosial Dan Humaniora (Unicssh)*, Atlantis Press, 2013.
- Saleh. N. N. (1992). *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30s/Pki Di Indonesia*. Pusat Sejarah Abri.
- Santosa. S. D. (2005). Soe Hok Gie Zaman Peralihan. *Gagas Media*.
- Soe Hok Gie. (1983). *Catatan Seorang Demontran*. Lp3es.
- _____ (1995a). *Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan*. Yayasan Benteng Budaya.
- _____ (1995b). *Zaman Peralihan* (Yogyakarta). Yayasan Benteng Budaya.
- Soerjadi, S. (1988). *Evolusi Dan Kudeta G 30 S/Pki* (Jakarta) [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Suastiani. (2014). Soe Hok Gie Dalam Wacana Dwifungsi Mahasiswa 1961-1969. *Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah*, 2, No 3, 310.
- Supriyatna. (2007). *Peranan Soe Hok Gie Dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1960-1968*. [Skripsi]. Universitas Sebelas Maret.
- Suryadinata, Y. D. (2024). Metode Historis Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Penelitian Sejarah. *Indoro: Cendikia Pendidikan*, 1–13.
- Thomas, R. S. (1973). Indonesian Politics And Society Under Guided Democracy. *Oxford University Press*, 181–182.
- Toto Widyarsono, Msi, A. S., M. Hum Dan Prof. Dr. Dwi Purwoko. (2011). Pengumpula Sumber Sejarah Lisan:Gerakan Mahasiswa 1966 Dan 1998. *Lp3es*, 5.

- Wedhaswary, V. F. (2020). Hari Ini Dalam Sejarah: 22 Februari 1967, Soekarno Serahkan Kekuasaan Kepada Soeharto. *Kompas.Com*.
- Wibisono. S. (2010). *Mengenang Serang Demonstran: Soe Hok Gie Dan Aktivisme Mahasiswa 1960-An*.
- Yoseph Yermias Patty. (2018). *Peran Mahasiswa Dalam Pelaksanaan Politik Dan Strategi Nasional* [Makalah]. Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Zou, Y. (2023). A Study On Marc Bloc'h Historical Theory- Centering On The Historian's Craft. *Atlantis Press*, 403–408.